

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Industri kendaraan komersial nasional kini menghadapi ancaman serius akibat maraknya impor truk dalam bentuk utuh (Completely Built Up/CBU) dari Tiongkok yang masuk melalui celah regulasi. Praktik ini tidak hanya menciptakan persaingan usaha yang timpang bagi produsen dalam negeri seperti PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI), tetapi juga secara langsung menggerus potensi pendapatan negara. Dengan masuk sebagai alat berat atau barang modal investasi, truk-truk impor ini berhasil menghindari skema perpajakan normal, termasuk tidak terdaftarnya Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang menjadi dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN-KB), sehingga menyebabkan hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam jumlah signifikan.

Kunci dari permasalahan ini terletak pada perbedaan status legal. Truk CBU impor diklasifikasikan bukan sebagai kendaraan bermotor, melainkan sebagai alat berat untuk operasional di jalan khusus seperti area tambang. Akibatnya, mereka terbebas dari kewajiban registrasi di Samsat, tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan tidak perlu melalui uji tipe laik jalan. Pengecualian ini secara efektif membuat mereka "tidak terlihat" oleh sistem perpajakan daerah, sekaligus membebaskan mereka dari kewajiban mematuhi standar emisi Euro IV yang mengikat produsen lokal.

Kondisi ini sangat kontras dengan model bisnis yang dijalankan oleh PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI). Sebagai produsen yang patuh, HMMI beroperasi dengan skema perakitan lokal (Completely Knocked Down/CKD) yang sepenuhnya terintegrasi dalam sistem regulasi nasional. Selain menyerap tenaga kerja dan menggunakan komponen dari pemasok lokal untuk memenuhi kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%, setiap unit yang diproduksi oleh HMMI wajib didaftarkan, memiliki NJKB yang jelas, dan menjadi objek pajak yang berkontribusi langsung pada pendapatan negara dan daerah.

Fenomena ini menghadirkan sebuah dilema kebijakan yang krusial. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan sektor pertambangan melalui kemudahan investasi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun di sisi lain, celah regulasi ini justru menjadi bumerang yang melemahkan fondasi industri manufaktur otomotif, menghilangkan potensi pendapatan pajak yang vital, dan meningkatkan risiko polusi. Tanpa adanya sinkronisasi regulasi yang tegas, kebijakan pro-investasi justru mengorbankan industri nasional yang selama ini patuh pada peraturan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa industri otomotif, khususnya segmen kendaraan komersial, merupakan pilar strategis bagi perekonomian Indonesia. Sebagai tulang punggung sistem logistik, sektor ini tidak hanya berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga menjadi sumber penerimaan pajak yang signifikan. Adanya disrupsi akibat persaingan tidak adil dan kebocoran potensi pajak ini menuntut dilakukannya kajian mendalam untuk menganalisis celah regulasi yang ada, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu melindungi industri dalam negeri dan mengamankan pendapatan negara.

I.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan magang di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam celah regulasi yang memungkinkan truk CBU Tiongkok masuk ke Indonesia tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku untuk kendaraan niaga domestik, seperti uji tipe dan sertifikasi laik jalan.
2. Membandingkan standar industri yang diterapkan oleh Hino dengan praktik impor truk CBU Tiongkok.
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah guna memperbaiki regulasi dan mendukung industri manufaktur dalam negeri.

I.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa: Meningkatkan pemahaman mengenai regulasi industri otomotif, standar emisi, serta dampaknya terhadap persaingan usaha

dan ekonomi nasional, sekaligus mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan.

2. Bagi Industri (PT HMMI): Memberikan data dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam diskusi dengan pemerintah mengenai pentingnya regulasi yang adil untuk melindungi produsen dalam negeri.
3. Bagi Pemerintah dan Regulator: Menyajikan kajian yang dapat menjadi dasar untuk meninjau ulang dan memperbaiki celah regulasi terkait impor kendaraan CBU, standar emisi, dan kebijakan TKDN.

I.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Magang 1 yang dijalani penulis berlokasi di PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia selama periode tiga bulan. Penugasan difokuskan pada dua divisi kunci yang memiliki peran integral dalam alur produksi kendaraan, yaitu Divisi *Corporate External Directorate* (CED) dan Divisi *Quality Assurance* (QA). Kedua departemen ini dipilih karena keterkaitannya yang erat dalam menunjang keseluruhan proses manufaktur, mulai dari aspek regulasi eksternal hingga penjaminan mutu produk akhir yang dihasilkan oleh perusahaan.

Program magang ini berjalan secara bertahap. Pada minggu awal, kegiatan difokuskan pada periode orientasi untuk memberikan pemahaman dasar mengenai lingkungan kerja dan proses adaptasi bagi para mahasiswa/taruna. Kemudian, memasuki minggu kedua hingga akhir periode magang, program dilanjutkan ke tahap pendalaman, di mana setiap peserta diarahkan untuk fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik sesuai dengan fungsi dan alur kerja di divisi penempatan masing-masing.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Magang I dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, yang beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Jl. Damar Blok D1 No. 1, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181.

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pembahasan materi pada setiap bab, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, waktu dan tempat pelaksanaan magang, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya dan perkembangan PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI), struktur organisasi dan kelembagaan perusahaan, profil dan bidang usaha, visi dan misi, serta fasilitas-fasilitas utama yang mendukung kegiatan produksi dan operasional.

BAB III

Berisi tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), proses produksi kendaraan, analisis kebijakan regulasi kendaraan bermotor, perbandingan antara kendaraan CKD dan CBU, serta dampak kebijakan pro-investasi terhadap industri otomotif nasional berdasarkan hasil observasi magang dan kajian jurnal.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil kegiatan magang di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia, data produksi kendaraan, analisis pengamatan terhadap proses produksi dan penerapan standar industri, serta perbandingan regulasi antara kendaraan CKD Hino dan CBU Tiongkok berdasarkan kebijakan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang referensi dan sumber penulisan laporan.